

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR CAMAT BINUANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya lah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Binuang tahun 2024.

LAKIP Kecamatan Binuang disusun sebagai upaya untuk memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan dana APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua staff Kecamatan Binuang yang telah dengan penuh kebersamaan dapat memberikan sumbang saran dan pendapat dalam penyusunan LAKIP ini.

Demikian semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kita semua.

Binuang, 31 Desember 2024

CAMAT BINUANG

DULPAKAR, SE
Pembina
NIP. 197004211993111 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I	
Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	3-4
1.2 Dasar Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Gambaran Umum	6
1.4.1 Kondisi Geografis Daerah	6-10
1.4.2 Gambaran Pelayanan	10-11
1.4.3 Struktur Organisasi	12-19
1.4.4 Kinerja Pelayanan	19
1.4.5 Tantangan dan Peluang	19-21
BAB II	
Rencana Strategis Berdasar- kan Tugas dan Fungsi	
2.1 Rencana Strategis	22
2.1.1 Identifikasi Masalah	22
2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	22-23
2.1.3 Telaahan Lakip	23
2.1.4 Telaahan Rencana	23-24
2.1.5 Penentuan isu strategis	24-27
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	27
2.2.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	27-29
2.2.2 Strategi dan Kebijakan	29-40
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Binuang 2024	
3.1 Indikator Kinerja	41-47
3.2 Evaluasi Kinerja	47-52
3.3 Akuntabilitas Keuangan	52-53
BAB IV	
Penutup	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Hambatan dan Permasa- lahan	54
4.3 Rencana Tindak Lanjut	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Binuang merupakan salah satu dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

Peraturan Bupati Serang Nomor 100. Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kecamatan Binuang merupakan SKPD tersendiri dimana senantiasa dituntut untuk dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara entitas, dengan membuat perencanaan strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang selaras dengan RPJM Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sebagai pelaksanaan asas akuntabilitas, yang merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sebagai bentuk akuntabilitas, Kecamatan Binuang berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pengungkapan informasi tentang kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program yang telah ditentukan oleh Kecamatan Binuang. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan system perencanaan strategis, system penganggaran, dan

system akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggung jawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah

Dasar penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Binuang tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 No.49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Serang.
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Binuang adalah:

1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam PP no 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang terkandung dalam rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan Binuang tahun 2024.
3. Bahan evaluasi dan acuan untuk menentukan rencana kerja tahun berikutnya.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Binuang terletak disebelah Timur Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan luas wilayah 35,74 Km² ,jarak dari ibu kota Kecamatan ke Kabupaten ±32 KM yang dihubungkan dengan jalan Negara/ Provinsi/Kabupaten. Dengan batas– batas sebagai berikut:



Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kecamatan Carenang

SebelahTimur :Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Sebelah Selatan :Kecamatan Cikande

Sebelah Barat : Kecamatan Kibin

Kecamatan Binuang terbagi atas:

Desa	7
Kampung	86
RW	30
RT	101

Tabel1
Luas Wilayah Desa Di Kec Binuang

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase Terhadap Luas Kecamatan	Ket.
1	Gembor	3,76	20,83	
2	Renged	2,80	15,52	
3	Cakung	3,10	17,18	
4	Lamaran	1,75	9,70	
5	Warakas	2,79	15,47	
6	Binuang	1,72	9,50	
7	Sukamampir	2,13	11,80	
Jumlah		18,05	100	

*Sumber: Kecamatan Binuang Dalam Angka 2019

Tabel 2
Letak Geografis Desa di Kecamatan Binuang

No.	Desa	Pantai	Bukan Pantai		
			Lembah	Kawasan Lereng	Dataran
1	Gembor	-	-	-	√
2	Renged	-	-	-	√
3	Cakung	-	-	-	√
4	Lamaran	-	-	-	√
5	Warakas	-	-	-	√
6	Binuang	-	-	-	√
7	Sukamampir	-	-	-	√

Tabel 3
Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang

No.	Desa	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)		
		<500	500– 700	>700
1	Gembor	√	-	-
2	Renged	√	-	-
3	Cakung	√	-	-
4	Lamaran	√	-	-
5	Warakas	√	-	-
6	Binuang	√	-	-
7	Sukamampir	√	-	-

*Sumber: Kecamatan Binuang Dalam Angka 2019

Tabel4
Jarak Antar Desa di Kecamatan Binuang

Desa	Gembor	Renged	Cakung	Lamaran	Warakas	Binuang	Sukamampir
Gembor	-	3	3	4	8	7	8
Renged	3	-	3	7	8	7	8
Cakung	3	3	-	5	4	3	4
Lamaran	4	7	5	-	3	3	4
Warakas	7	8	4	3	-	2	3
Binuang	7	7	3	3	2	-	1
Sukamampir	8	8	4	4	3	1	-

*Sumber:Kecamatan Binuang Dalam Angka 2019

Tabel 5
Jumlah Penduduk di Kecamatan Binuang

No	Desa	Jumlah Kampung	Jumlah RT/RW		Jumlah Penduduk		
			RT	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Binuang	10	10	5	2526	2549	5075
2	Cakung	10	12	4	1596	1711	3307
3	Gembor	15	21	5	3924	4717	8641
4	Lamaran	21	17	5	2574	2619	5193
5	Renged	4	8	3	1727	1817	3544
6	Sukamampir	17	19	4	2338	2245	4583
7	Warakas	9	14	4	1778	2178	3956
Jumlah		86	101	30	16463	17836	34299

1.4.2 GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BINUANG

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi



Pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang

Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Binuang

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta Melaporkan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
4. Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. Perizinan ;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.4.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang

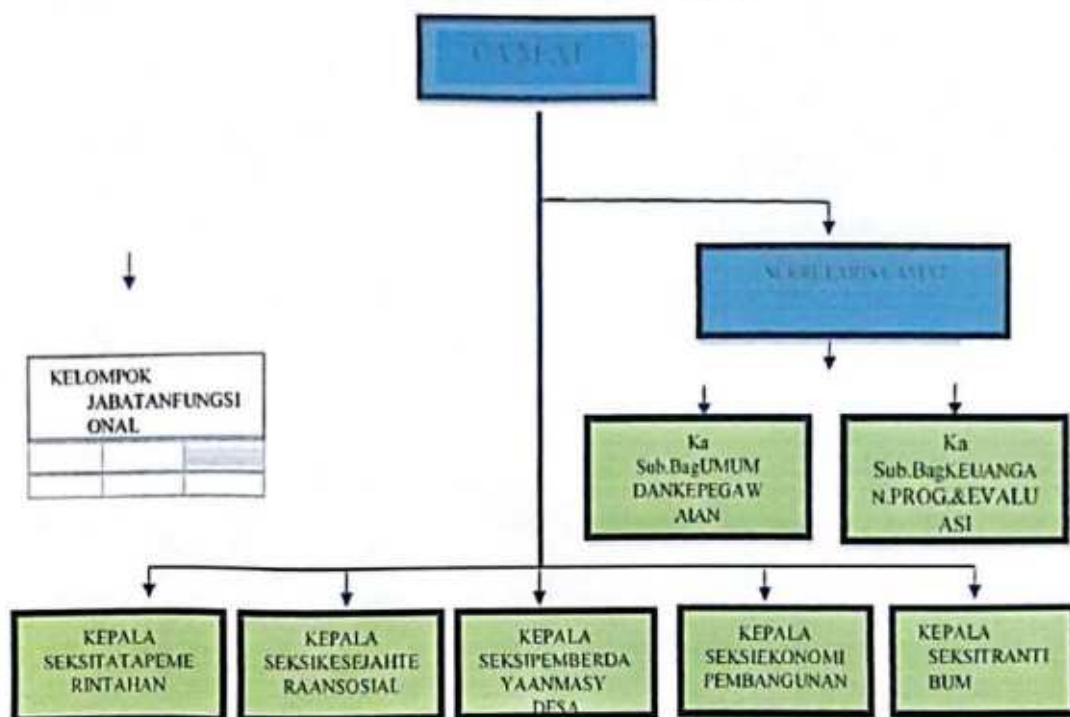
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BINUANG**



Sumber Daya Kantor Kecamatan Binuang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Binuang bisa dibagi meliputi:

Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staff, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah di canangkan. Adapun rincian nya sebagai berikut:

Tabel5

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Staff Pelaksana	5
JUMLAH		14

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Sedangkan Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 6

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan
Binuang Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	3
3.	IV A	3
4.	IV B	-
JUMLAH		7

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Di dalam Kantor Kecamatan Binuang memiliki komposisi aparatur seperti yang telah di gambarkan di atas, seluruh eselon jabatan structural sudah di duduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka hampir seluruh jabatan structural mempunyai tenaga pelaksana.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut:

Tabel 7

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan
Binuang Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya /IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I /IV d	-
3.	Pembina Muda / IVc	-
4.	Pembina Tingkat I /IV b	-
5.	Pembina / Iva	3
6.	PenataTingkat I /III d	1
7.	Penata /IIIc	4
8.	Penata MudaTingkat I/ III b	3

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
9.	Penata Muda/ III a	1
10.	Pengatur Tingkat I /II d	1
11.	Pengatur/ II c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat III b	-
13.	Pengatur Muda/ II a	1
14.	JuruTingkat I/ I d	-
15.	Juru /Ic	-
16.	Juru Muda Tingkat I/ Ib	-
17.	Juru Muda /Ia	-
JUMLAH		14

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Binuang adalah golongan II/a dan II/b, yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 3 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut:

Tabel 8
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan
Binuang BerdasarkanTingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister/S 2	3
2.	Sarjana/S1	9
3.	Sarjana Muda /Diploma	0
4.	SLTA/ sederajat	2
5.	SLTP/ sederajat	0
6.	SD/ sederajat	0
JUMLAH		14

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Binuang adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada table berikut ini:

Tabel 9

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	4	-	-
Fungsional	-	1	-
Staf	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Binuang. Untuk Diklat Struktural 2 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi.

- b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang
- Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Binuang yaitu:

Tabel 10

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	-	1	-

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
	Ruang Pertemuan	1	-	1	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	-	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Dua	7	3	4	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Podium	-	-	-	-
	Meja Kerja	18	6	12	-
	Kursi Kerja	34	20	14	-
	Kursi Tamu/Sofa	6	4	2	
	Meja Pelayanan	2	2	-	-
	Meja Rapat	1	-	1	-
	Kursi Rapat	160	160	-	-
	Filling Cabinet	7	3	4	-
	Almari	7	7	-	-
	Rak buku arsip	1	-	1	-
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	3	2	1	-
	Printer	9	6	3	-
	Laptop	9	7	2	-
	Notebook	-	-	-	-
	Notebook Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	-	-	-	-
	Televisi	1	-	-	1
	Sound system	-	-	-	-
	Wirelles	2	2	-	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	2	-	-	2

Air Conditioner	6	3	-	3
Mesin potong rumput	2	1	-	1
Dispenser	1	-	-	1
Genset	1	-	-	1
CCTV	4	-	-	4

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Binuang ini di harapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat di lihat kondisi kantor sendiri, untuk nanti nya dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Binuang.

1.4.4 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi lainnya. Kantor Kecamatan Binuang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat di pungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Binuang dapat di lihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2016-2021) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran kegiatan kantor;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

1.4.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Binuang mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Binuang, di mana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/ kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan organisasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; Jumlah

Aparatur Kantor Kecamatan Binuang yang cukup,seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staff pelaksana,serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua;

- 4) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 desa;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 7) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan Antara peluang dan tantangan adalah 9:8,dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin di capai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Binuang

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Binuang adalah:

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

2.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis"** dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia Dan Berbudaya
2. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan

Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

5. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Binuang mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Binuang mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi keempat yaitu: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional***, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Binuang mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

2.1.3 Telaahan Lakip Kementrian/Lembaga dan Lakip SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Binuang melaksanakan kewenangan:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang.

2.1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang:

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi lainnya. Kantor Kecamatan Binuang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Lakip K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RT/RW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Binuang melaksanakan kewenangan:

- 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- 2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang.

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang, pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Binuang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Lakip Kantor Kecamatan Binuang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2016-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
- 3) Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- 4) Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan;
- 5) Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/ kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;

- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan organisasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 5) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 6) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 7) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - 1) Peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - 2) Ciptakan ***Good and Clean Governance*** menuju Reformasi Birokrasi;
 - 3) Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 1) Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat;
 - 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1) Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - 2) Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.2 TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Binuang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis"**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia Dan Berbudaya
2. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
5. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah diamanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021 – 2026 maka Kecamatan Binuang menetapkan tujuan dari Rencana Strategis dimaksud Antara lain:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;

3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya kecamatan dan desa;
4. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang;
5. Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
6. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan

Kemudian ditetapkan pula sasaran sebagai tindak lanjut operasional yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kantor Kecamatan Binuang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
3. Meningkatnya disiplin aparaturnya kecamatan dan desa;
4. Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang;
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum;
6. Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kantor Kecamatan Binuang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Binuang

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis	2. Meningkatnya kesejahteraan semakin maju berkeadilan dan Agamis khususnya masyarakat kecamatan Binuang.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas	3. Meningkatnya pembangunan prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai di kecamatan dan desa
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	4. Meningkatnya koordinasi agar terciptanya kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja untuk desa dan Kecamatan.
5. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan public yang prima di dukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional.	5. Meningkatnya pelayanan public yang baik dan birokrasi kompeten dan professional.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan spiritual dalam kehidupan individu, Bermasyarakat dan Bernegara.	6. Meningkatkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dalam individu bermasyarakat dan Bernegara.

2.2.2 Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Binuang

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana Kantor Kecamatan Binuang menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stake holder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. KEKUATAN (S)

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
- 3) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Binuang yang mencukupi, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staff pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua;
- 4) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.

2. PELUANG (O)

- 1) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 2) Posisi wilayah yang strategis yakni berada di jalur provinsi yang menghubungkan Kota Serang dengan Kabupaten Serang serta berbatasan langsung dengan Kota Serang;
- 3) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 desa;
- 4) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

3. KELEMAHAN (W)

- 1) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparaturn pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 2) Kualitas / profesionalisme aparaturn pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
- 3) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 4) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 5) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

4. ANCAMAN (T)

- 1) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan;
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan danrogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

Setelah identifikasi dilakukan, kemudian dirumuskan kedalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah:
 - 1) Optimalkan kebijakan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat untuk meningkatkan disiplin PNS;
 - 2) Optimalkan kebijakan PATEN untuk mengembangkan posisi wilayah kecamatan yang strategis;
 - 3) Optimalkan seluruh pejabat struktural yang ada untuk meningkatkan potensi penduduk yang besar;
 - 4) Optimalkan aparatur SKPD lain yang ada di Kecamatan untuk memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Serang ;
 - 5) Optimalkan lembaga sosial dan keagamaan untuk menyerap dana dari APBN dan APBD Provinsi untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.(ST)adalah:
 - 1) Tingkatkan disiplin aparatur dengan penerapan PP 53 Tahun 2010;
 - 2) Tingkatkan kualitas aparatur sebagai tuntutan untuk mengembangkan wilayah yang strategis;
 - 3) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 Desa;
 - 4) Menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Serang;
 - 5) Menghilangkan rasa apatis masyarakat dengan adanya dana dari APBN dan APBD Propinsi dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO)adalah:
 - 1) Optimalkan kebijakan otonomi daerah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
 - 2) Optimalkan kebijakan PATEN untuk memberikan pelayanan pada pedagang kaki lima kearah yang tertib dan teratur;
 - 3) Optimalkan seluruh pejabat structural yang ada dikecamatan untuk membina organisasi perguruan silat ;
 - 4) Optimal kan peran aparatur SKPD lain yang ada dikecamatan untuk menurunkan angka pengangguran;

- 5) Optimalkan peran dan fungsi lembaga sosial dan keagamaan untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
- Meningkatkan disiplin aparatur untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
 - Tingkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur untuk menertibkan pedagang kaki lima;
 - Melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan;
 - Menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan kerja;
 - Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat dalam pendidikan politik dan demokrasi untuk menjaga sarana dan prasarana hasil pembangunan

Uraian diatas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada table di bawah ini

FaktorInternal	Kekuatan (S)	Kelemahan(W)
	1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat; 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; 3) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Binuang yang besar, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staff pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua; 4) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan; 5) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga social dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam Pemberdayaan masyarakat.	1) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa; 2) Kualitas/ profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif; 3) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 4) Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah; 5) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil Pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Peluang(O)	StrategiS+ O	StrategiW +O
1) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 2) Posisi wilayah yang strategis yakni berada di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang serta berbatasan langsung dengan Kota Serang; 3) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 desa (merupakan salah satu kecamatan dengan desa terbanyak di Kabupaten Serang) ; 4) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat; 5) Ketersediaan dana APBD dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.	1) Optimalkan kebijakan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat untuk meningkatkan disiplin PNS; 2) Optimalkan kebijakan PATEN untuk mengembangkan posisi wilayah kecamatan yang strategis; 3) Optimalkan seluruh pejabat structural yang ada untuk Meningkatkan potensi penduduk yang besar; 4) Optimalkan aparatur SKPD lain yang ada di Kecamatan untuk memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Serang; 5) Optimalkan lembaga social dan keagamaan untuk menyerap dana dari APBN dan APBD Provinsi untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan Infrastruktur wilayah.	1) Tingkatkan disiplin aparatur dengan penerapan PP 53 Tahun 2010; 2) Tingkatkan kualitas aparatur sebagai Tuntutan untuk mengembangkan wilayah yang strategis; 3) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 Desa; 4) Menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Serang; 5) Menghilangkan rasa apatis masyarakat dengan adanya dana dari APBN dan APBD Propinsi dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan.

Ancaman(T)	StrategiS+ T	StrategiW +T
1) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;	1) Optimalkan kebijakan otonomi daerah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;	1) Tingkatkan disiplin aparatur untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
2) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ;	2) Optimalkan seluruh pejabat struktural yang ada dikecamatan untuk membina organisasi perguruan silat ;	2) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan;
3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia Produktif sebagai akibat dari tidak seimbang nya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;	3) Optimalkan peran aparatur SKPD lain yang ada di kecamatan untuk menurunkan angka pengangguran;	3) Menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan kerja ;
4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.	4) Optimalkan peran dan fungsi lembaga social dan keagamaan untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.	4) Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat dalam pendidikan politik dan demokrasi untuk menjaga sarana dan prasarana hasil pembangunan.

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

1. Optimalkan kebijakan otonomi daerah yang mengatur pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat untuk meningkatkan disiplin PNS;
2. Optimalkan kebijakan PATEN untuk mengembangkan posisi wilayah kecamatan yang strategis;
3. Optimalkan seluruh pejabat structural yang ada untuk meningkatkan potensi penduduk yang besar;
4. Optimalkan aparatur SKPD lain yang ada diKecamatan untuk memanfaatkan anggaran lintas SKPD KabupatenSerang;
5. Optimalkan lembaga social dan keagamaan untuk menyerap dana dari APBN

dan APBD Provinsi untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

6. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 Desa;
7. Menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan anggaran lintas SKPD Kabupaten Serang;
8. Menghilangkan rasa apatis masyarakat dengan adanya dana dari APBN dan APBD Provinsi dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan.
9. Optimalkan seluruh pejabat structural yang ada dikecamatan untuk membina masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan;
10. Optimalkan peran dan fungsi lembaga sosial dan keagamaan untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.
11. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum ;
12. Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat dalam pendidikan politik dan demokrasi untuk menjaga sarana dan prasarana hasil pembangunan.

Kemudian hasil yang di dapatkan tersebut,jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Binuang,maka menjadi :

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian,dan Persandian;
2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini akan dibahas mengenai kesesuaian dan kesinergian serta sinkronisasi Antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Kantor Kecamatan Binuang dengan RPJMD. Pada bagian ini yang menjadi titik tekan adalah indikator kinerja Kantor Kecamatan Binuang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun gambaran tersebut tertuang dalam table berikut ini:

Tabel 12
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2024 Pada Misi 4

TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
		1.1	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang
		1.2	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan daerah
		2.1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan Sarana dan prasarana kerja
		3	Meningkatnya kepuasan masyarakat
		3.1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan
		3.2	kecamatan Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya kecamatan dan desa
		3.3	Terwujudnya peningkatan keamanan Dan ketertiban umum

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2016-2024 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Binuang. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Binuang pada periode 2016-2024 tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 13

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BINUANG TAHUN 2016– 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan antara lain :Jumlah layanan yang diberikan,Rendahnya complain dari masyarakat atas layanan,Kecepatan dan ketepatan serta kesederhanaan prosedur layanan	- <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> - <i>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	- Rapat Koordinasi - Monitoring dan Evaluasi - Penyusunan Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
2	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja antara lain Jumlah sarana dan prasarana kerja kecamatan, jumlah fasos Fasus di kecamatan	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	- Sarana dan prasarana - Alat tulis kantor - Pengadaan fasum dan fasos serta kelengkapannya - Kegiatan sesuai tupoksi - Kegiatan sesuai pelimpahan kewenangan, dll
3	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa;	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa, ketepatan waktu atas layanan kecamatan, tingkat disiplin pegawai yang masuk dan pulang tepat waktu	Program Peningkatan disiplin Aparatur	- Bimbingan Teknis - Monitoring dan Evaluasi disiplin aparatur
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, SKPD Kabupaten Serang	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang, gantarat lain: Tingkat Keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, kecamatan dan	-Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa -Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	- Asistensi RKPDP Desa - Pembinaan pemerintahan Desa - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintahan Desa - Asistensi APBDes - Asistensi Peraturan Desa - Rapat Koordinasi Kecamatan tentang Pemerintahan Desa

		SKPD		
--	--	------	--	--

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
5	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum antara lain : rendernya pelanggaran trantibum dimasyarakat	Program penyelenggaraan ketentramandan ketertiban umum	Aspekpreventif: - Sosialisasi - Monitoring danEvaluasiKewilayahan - Pengendalian Tramtib AspekKuratif: - Sarana danprasarana
6	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunanan tara lain :Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina	- Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Peningk.Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dlm Pembangunan	- Pemberdayaan Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi - Kunjungan Kemasyarakatan

Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja yang digunakan dalam penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kecamatan Binuang.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja ini, terlebih dahulu perlu diketahui indikator-indikator kinerja dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Binuang Tahun 2024. Terdiri dari 22 kegiatan sesuai dengan anggaran Kecamatan Binuang berdasarkan APBD 2024

3.1 INDIKATOR KINERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp.275.629.952,00

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp 27.952.744,00**

Output

Tersedianya Belanja Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Outcome

Seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya

2. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp 247.677.208,00**

Output

Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor

Outcome

Terpenuhinya tenaga menunjang pelayanan umum kecamatan

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.640.000,00

Output

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Outcome

4. Penyediaan bahan logistic kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp.19.776.000,00

Output

Tersedianya logistic kantor

Outcome

Tersedianya ATK, Makan minum pegawai,tamu dan rapat.

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp.5.731.400,00

Output

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcome

fotocopy,Jilid,spanduk baliho,kartu kendali

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp.7.200.000,00

Output

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Outcome

Adanya Koran/majalah (meningkatnya wawasan pengetahuan petugas)

7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.93.790.400,00**

Output

Tersedianya anggaran SPPD

Outcome

Kelancaran pelaksanaan Tugas koordinasi dan konsultasi petugas

8. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp 6.160.000,00**

Output

Terpeliharanya peralatan kantor (Ac, Printer, Komputer)

Outcome

Pelayanan berjalan dengan baik dan nyaman.

9. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana gedung dan bangunan lainya

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp 11.200.000,00**

Output

Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor

Outcome

Gedung kantor bersih dan berfungsi dengan baik

10. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan

Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Input

Alokasi dana APBDsebesar **Rp.21.122.800,00**

Output

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Outcome

Terpenuhinya sarana mobilitas kerja pegawai kecamatan Binuang

11. Fasilitas kunjungan tamu

Input

Alokasi dana APBD sebesar **0**

Output

Tersedianya fasilitas kunjungan tamu

Outcome

Tersedianya Makan minum untuk tamu kecamatan

12. Pengadaan Mebeul

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp. 0**

Output

Tersedianya mebeuler yang diperlukan

Outcome

13. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.2.423.932.000,00**

Output

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Outcome

Terbayarkanya gaji dan tunjangan ASN

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan publik

Rp.136.972.700,00

1. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.18.216.700,00**

Output

Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal

Outcome

Terlaksananya musrembang RKPD, Pembayaran pajak PBB

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.118.756.000,00**

Output

Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan

Outcome

Terlaksananya kegiatan ISBAT NIKAH, AKCF, HUT RI, PORKAB, Gotong Royong.

III. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Rp.79.625.400,00

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum muswarah perencanaan pembangunan di desa

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.22.190.500,00**

Output

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa

Outcome

Dokumen RKPD

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.47.478.900,00**

Output

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Outcome

Terbinanya PKK, Kegiatan P2TP2A, Kegiatan Serang Sehat, kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp.17.970.000,00

1. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp. 17.970.000,00**

Output

Terfasilitasinya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Outcome

Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentraman dan ketertiban

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rp.144.889.500,00

- 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pemantapan pengamalan pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan RI.**

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.56.464.500,00**

Output

Terfasilitasinya Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pemantapan pengamalan pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI. *Outcome*

Terlaksananya upacara HUT RI

- 2. Pembinaan kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.**

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.88.425.000,00**

Output

Terfasilitasinya pembinaan kerukunan, guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan Nasional.

Outcome

Terlaksananya kegiatan keagamaan, Tersedianya anggaran penyelenggaraan MTQ

VI. Program pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Rp.

102.850.000,00

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Input

Alokasi dana APBD sebesar **Rp.102.850.000,00**

Output

Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Outcome

Admintrasi pemerintahan desa lebih baik dan sesuai peraturan.

3.2. EVALUASI KINERJA

Untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang maka perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dari indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2024.

Dalam pengukuran indikator dan evaluasi kinerja yaitu dilakukan secara analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Kecamatan Binuang dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, yang selanjutnya dilakukan pula pengukuran terhadap setiap perbedaan kinerja (**Performance Gap**) pada masing-masing kegiatan yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya Gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berikut ini akan diuraikan realisasi capaian kinerja pada setiap indikator kegiatan Kecamatan Binuang tahun 2024:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.2.423.932.000,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.2.277.076.425,00 (93,44 %)

Capaian Kinerja Outcome 93,44%

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp. 1.640.000,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.0

Capaian Kinerja Outcome 0 %

3. Kegiatan bahan logistic kantor

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.19.776.000,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.16.189.188,00 (81,86 %)

Capaian Kinerja Outcome 81.86 %

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.5.731.400,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.0 (0.0 %)

Capaian Kinerja Outcome 0,0 %

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.7.200.000,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.4.200.000,00 (58,33 %)

Capaian Kinerja Outcome 58,33 %

6. Fasilitasi kunjungan tamu

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia 0

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran 0

Capaian Kinerja Outcome 0

7. Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.93.790.400,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.76.540.000,00 (81,61 %)

Capaian Kinerja Outcome 81,61 %

8. Pengadaan mebeuler

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia 0

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran 0 Capaian

Kinerja Outcome 0 %

9. **Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air**
Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia **Rp.27.952.744,00**
Capaian Kinerja Output 100,00%
Realisasi Anggaran **Rp.18.155.824 (64,95%)**
Capaian Kinerja Outcome 64,95%
10. **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**
Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia **Rp.247.677.208,00**
Capaian Kinerja Output 96,83%
Realisasi Anggaran **Rp.239.827.772,00 (96,83%)**
Capaian Kinerja Outcome 96,83 %
11. **Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**
Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia **Rp.21.122.800,00**
Capaian Kinerja Output 100%
Realisasi Anggaran **Rp.21.030.000,00 (99,56 %)**
Capaian Kinerja Outcome 99,56 %
12. **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**
Capaian Kinerja Input100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia **Rp.6.160.000,00**
Capaian Kinerja Output100%
Realisasi Anggaran **Rp.4.200.000,00 (68,18 %)**
Capaian Kinerja Outcome 68,18 %
13. **Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**
Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia **Rp.11,200,000,00**
Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran **Rp. 10.500.000,00 (93,75 %)**
Capaian Kinerja Outcome 93,75 %

14. Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.18.216.700,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.0

Capaian Kinerja Outcome 100%

15. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp 118.756.000,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.59.042.900,00 (49,72%)

Capaian Kinerja Outcome 49,72%

16. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum muswarah perencanaan pembangunan di desa

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.22.190.500,00

Capaian Kinerja Output 53,90 %

Realisasi Anggaran Rp.11.960.000,00 (53,90 %)

Capaian Kinerja Outcome 53,90 %

17. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.47.478.900,00

Capaian Kinerja Output 100%

Realisasi Anggaran Rp.21.800.000,00 (45,92 %)

Capaian Kinerja Outcome 45,92%

18. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Capaian Kinerja Input 100%

Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.17.970.000,00

Capaian Kinerja Output 100,00%

Realisasi Anggaran Rp.
7.740.000,00 (43,07 %) Capaian
Kinerja Output 43,07 %

- 19. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pemantapan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan RI.**

Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.56.464.500,00
Capaian Kinerja Output 100%
Realisasi Anggaran Rp.33.975.000,00 (60,17%)
Capaian Kinerja Outcome 60,17 %

- 20. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.**

Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.88.425.000,00
Capaian Kinerja Output 80,97 %
Realisasi Anggaran Rp.71.602.000,00 (80,97 %)
Capaian Kinerja Outcome 80,97 %

- 21. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**

Capaian Kinerja Input 100%
Dana yang dibutuhkan seluruhnya tersedia Rp.102.850.000,00
Capaian Kinerja Output 100%
Realisasi Anggaran Rp.28.563.000,00 (27,77 %)
Capaian Kinerja Outcome 27,77 %

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Binuang setelah perubahan anggaran tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.3.360.936.352,00** yang terbagi atas :

1. Belanja Operasi sebesar **Rp. 3.346.483.352,00** untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa dalam 1 Tahun
2. Belanja Modal sebesar **Rp.14.453.000,00** untuk membiayai belanja Modal peralatan dan mesin.

Dari anggaran belanja daerah yang diberikan setelah perubahan sebesar **Rp.3.360.936.352,00** tersebut Kecamatan Binuang merealisasikan pengeluaran anggaran sebesar **Rp.2.905.642.109,00** atau sebesar **(86,08 %)**. Sedangkan sisa anggaran sebagai selisih antara alokasi anggaran dengan realisasi sebesar **Rp 455.294.243,00 (13,92 %)**.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Lakip Kecamatan Binuang, maka upaya pencapaian Visi untuk "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis". Diaktualisasikan melalui rencana kerja tahun 2024 yang disesuaikan dengan anggaran Tahun 2024

Sesuai dengan anggaran Tahun 2024 Kecamatan Binuang mencapai Rp. 3.360.936.352,00 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa sebesar Rp. 3.346.483.352,00 sedangkan untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 14.453.000,00 Dengan demikian pada tahun 2024 Kecamatan Binuang dapat melaksanakan 6 program yang terdiri dari 21 kegiatan sebagaimana telah teruraikan pada Bab sebelumnya.

Dari hasil pengukuran pada indikator-indikator kinerja berupa kegiatan-kegiatan 2024 dari sisi penggunaan anggaran mencapai 86,08 %.

4.2. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih Kurang Optimalnya Pengelolaan Potensi yang ada di kecamatan Binuang
2. Masih adanya Kebutuhan yang belum terakomodir karena keterbatasan dana
3. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur
4. Masih terbatas nya pemahaman terhadap regulasi atau peraturan baru

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengeliminir berbagai permasalahan tersebut tentunya perlu dikembangkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran secara benar dan sesuai peraturan
2. Secara rutin berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan
3. Memfungsikan perangkat yang ada meskipun harus rangkap jabatan
4. Mendidik pegawai dengan mengikuti diklat yang diselenggarakan Pemda

Binuang 31 Desember 2024


CAMAT BINUANG
DULHAKAR, SE
NIP. 197004211 99311 1 001